

Bawaslu Beri 4 Catatan KPUD Kab. Bogor Soal Penetapan DPT

CIBINONG (IM) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor menetapkan 3,8 juta orang sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bawaslu pun berikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan.

Setidaknya ada 4 catatan khusus dari Bawaslu untuk KPUD Kabupaten Bogor, di antaranya administrasi kependudukan, penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga adanya Pemilih potensial yang belum memiliki E-KTP.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah menyebut, pihaknya mengapresiasi Rapat pleno penetapan DPT yang telah disahkan oleh KPUD Kabupaten Bogor dengan jumlah total DPT 3.889.441 pemilih.

"Jumlah ini turun dari Jumlah Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir yang ditetapkan pada pleno PPK sekabupaten Bogor akibat adanya tahapan analisa kegunaan antar kabupaten, masukan masyarakat dan rekomendasi panwaslu kecamatan," kata Irvan melalui keterangannya, Jumat (23/6).

Berkaitan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogor yang hadir dalam Rapat Pleno DPT ini memberikan Apresiasi kepada KPU beserta Jajaran PPK dan PPS se-Kabupaten Bogor yang telah menyelesaikan tahapan penyusunan daftar pemilih sampai ditetapkan DPT.

Selain itu, kata Irvan, Bawaslu Kabupaten Bogor juga memberikan Catatan dalam pelaksanaan penyusunan daftar pemilih tetap tersebut.

"Terdapat pemilih baru di Kabupaten Bogor yang direkomendasikan Bawaslu tidak dapat dimasukkan

karena pemilih tersebut terdaftar di wilayah lain," ujarnya.

Namun, lanjut Irvan, beberapa pemilih baru ini secara administrasi kependudukan terdaftar di Kabupaten Bogor.

"Maka Bawaslu Kabupaten Bogor meminta KPUD untuk melakukan perubahan pada Rapat Pleno KPU provinsi Jawa Barat, hal ini penting dilakukan untuk memastikan hak konstitusional warga agar terdaftar di wilayah dimana pemilih tersebut secara administrasi kependudukan," terangnya.

Catatan kedua, tambah Irvan, dalam hal pembentukan TPS lokasi khusus, KPU Kabupaten Bogor hanya mendirikan TPS lokasi khusus di Lapas dan Rutan.

"Sementara potensi pemilih luar wilayah yang akan memilih di Kabupaten Bogor dan menjadi pemilih Kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang berlokasi di Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, Balai Sosial dan Rumah sakit, maka Bawaslu meminta KPU agar mengusulkan Penambahan TPS Lokasi Khusus sekaligus segera melakukan pemetaan pemilih di lokasi-lokasi tersebut," paparnya.

Lebih lanjut, Irvan mengatakan, telah terjadi perubahan Pemilih Tidak memenuhi syarat (TMS) jalan penetapan DPT. Maka dari itu, KPU Kabupaten Bogor diminta untuk menyampaikan rincian kategori pemilih TMS tersebut.

"Karena terdapat pemilih potensial yang blm memiliki e-ktip, maka bawaslu meminta KPU agar melakukan koordinasi kepada dinas terkait untuk melakukan percepatan perekaman E-KITP sebelum pelaksanaan pemilu 2024," pungkasnya. ● **gio**

FOTO:ANT



PASAR BERSTATUS SNI DI JAWA BARAT

Warga memindai kode batang di sebuah kios di Pasar Atas, Cimahi, Jawa Barat, Jumat (23/6). Pasar Atas Cimahi menjadi salah satu pasar yang sudah memiliki status SNI melalui program pasar juara yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan kualitas pasar yang bersih dan nyaman.

Pemkot Bogor Bakal Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Pengganti Batu Bara

"Pengolahan sampah di Kota Denpasar saat ini sudah memasuki tahap yang sangat maju dan luar biasa yang diimpikan oleh semua wilayah di Indonesia. Karenanya, Kota Bogor akan mencontoh Bali untuk pengolahan sampah," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

BOGOR (IM) - Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan

Sampah Terpadu (TPST) di Kota Denpasar, Bali. Dedie mengatakan Kota Bogor akan mencontoh Bali untuk peng-

olahan sampah.

"Kita mendapatkan banyak sekali inspirasi yang luar biasa dari Kota Denpasar, di mana Kota Denpasar ini sebenarnya sudah mewujudkan mimpi-mimpi banyak orang, termasuk masyarakat yang cinta kepada lingkungan," kata Dedie dalam keterangannya, Jumat (23/6).

Pemkot Bogor, kata Dedie, berencana membangun instalasi pengolahan sampah refused derived fuel (RDF). Nantinya, kata Dedie, pengolahan sampah itu akan menjadi bahan bakar alterna-

tif pengganti batu bara.

"RDF itu jumpatan padat sebagai pengganti batu bara. Nah ini yang sebetulnya bisa menjadi bahan bakar masa depan. Kalau kita bicara global warming, RDF ini lebih ramah lingkungan. Termasuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang selama ini kita hadapi, yakni sampah," kata Dedie.

"Oleh karena itu, kita lakukan kunjungan ke beberapa TPST di Kota Denpasar yang sudah lebih dulu mengolah sampah jadi bahan bakar terbarukan," sambungnya.

Dedie mengatakan ada serangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengolahan sampah menjadi bahan bakar batu bara. Sampah-sampah dipilah dan dipisahkan antara organik dan nonorganik. Setelah sampah-sampah ini dikeringkan, kemudian dikemas untuk kemudian diproduksi menjadi RDF.

"RDF ini masuk dalam kategori bahan bakar alternatif terbarukan, yang diharapkan nanti dapat berperan serta

dalam mensubstitusi penggunaan bahan bakar fosil yang ujungnya adalah penurunan emisi karbon," kata Dedie.

Dedie menyebut ada dua TPST di Denpasar Bali yang dikunjungi, yakni TPT Tahura 1 dan 2. Dari dua TPST ini, Dedie dan jajaran DLH Kota Bogor melihat bagaimana pengelolaan sampah yang diubah menjadi bahan bakar alternatif dan pakan alternatif untuk peternak maggot.

"Di sana, kita diperlihatkan bagaimana pengelolaan sampah yang diubah menjadi bahan bakar alternatif yang terbuat dari serbuk kayu atau wood-pellet. Sementara di TPST Tahura 2, olahan sampah yang berasal dari limbah organik kota disulap jadi bahan pakan untuk maggot," ungkap Dedie.

"Pengolahan sampah di Kota Denpasar saat ini sudah memasuki tahap yang sangat maju dan luar biasa yang diimpikan oleh semua wilayah di Indonesia," tambahnya. ● **pra**

Bupati Bandung Geram, Minta Oknum Perangkat Desa Banyusari Dipecat

BANDUNG (IM) - Bupati Bandung, Dadang Supriatna geram dengan tindakan oknum perangkat desa berinisial R yang diduga meminta uang Rp 1 juta dan mengajak bersetubuh SR saat hendak mengurus dokumen kependudukan.

Dadang meminta kepala Desa Banyusari untuk memecat oknum perangkat desa berinisial R tersebut.

Menurutnya, perilaku oknum tersebut mencoreng nama baik desa dan Pemkab Bandung.

"Pertama saya, tidak ada lagi pungutan-pungutan liar ya. Artinya kalau ada oknum perangkat desa yang melakukan seperti itu ya saya serahkan kepada kepala desa untuk diberikan peringatan, kalau bisa diberhentikan saja," tegas dia di acara gerak jalan sehat di Stadion Si Jalak Harupat, Jumat (23/6).

Perilaku oknum tersebut, ia mengatakan telah mencoreng nama baik ma-

sarakat desa dan Pemkab Bandung. Apalagi selama ini, pemerintah terus berupaya maksimal memberikan pelayanan kependudukan.

"Karena itu mencoreng nama baik masyarakat desa sehingga kita sudah upaya dalam konteks memaksimalkan pelayanan kita kan sudah memberikan anjungan dukcapil mandiri artinya lebih dekat pelayanan ke masyarakat," tegas dia.

Dadang meminta kepala desa untuk memberikan sanksi berat kepada oknum perangkat desa tersebut. Sebab telah mencoreng nama baik desa dan Pemkab Bandung.

"Sehingga kalau ada oknum perangkat desa seperti itu berilah sanksi seberat-beratnya apalagi minta uang berlebihan dan sebagainya ini jadi mencoreng nama baik kita," ujar Bupati Bandung.

Terkait proses hukum yang sedang dijalankan oleh

aparatus kepolisian, ia mengaku menyerahkan hal itu kepada aparat kepolisian. Ia pun sudah mengintruksikan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa dan camat untuk memberikan pelayanan maksimal dan tidak ada pungutan.

Sebelumnya, jajaran Polresta Bandung menyelidiki kasus dugaan pelecchan terhadap wanita berinisial SR yang dimintai uang Rp 1 juta dan diajak berhubungan badan oleh R perangkat Desa Banyusari, Katapang, Kabupaten Bandung.

Pelapor SR dan terlapor R dijadwalkan akan dimintai keterangan.

Kasatreskrim Polresta Bandung Kopol Olistha Ageng Wicaksana mengatakan pelapor dan terlapor dimintai keterangan, Kamis (22/6) kemarin. Mereka diperiksa pada waktu yang berbeda. ● **pra**



PRODUKSI IKAN BANDENG PRESTO RUMAHAN DI SEMARANG

Pekerja menyelesaikan pembuatan ikan bandeng presto di rumah produksi Bandeng Presto Blendug, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/6). Dalam sebulan rumah produksi tersebut dapat menghasilkan lima ribu ekor ikan bandeng presto yang kemudian dipasarkan melalui daring ke berbagai wilayah di Indonesia dan telah menembus pasar mancanegara seperti Hongkong, Jepang serta Malaysia dengan harga jual Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per dus tergantung beratnya.

Warga Protes Baliho Iklan Perumahan Buat Semrawut Jalan Transyogi Bogor

BOGOR (IM) - Puluh baliho yang terpampang di tengah Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuai protes dari warga. Selain merusak pemandangan, semrawutnya baliho itu juga dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalan nasional tersebut.

Apalagi, papan baliho di sepanjang Jalan Raya Transyogi itu terpasang di tiang listrik dan pepohonan.

Baliho yang mayoritas iklan perumahan murah ini, sudah ada sejak beberapa tahun terakhir. Namun, tidak pernah ditertibkan oleh instansi terkait.

Selain merusak estetika, baliho yang rata-rata dipasang oleh pengembang perumahan ini juga dinilai dapat membahayakan pengguna jalan. Hal ini karena banyak reklame yang menutup rambu lalu lintas dan juga terkadang ada yang putus dan tergantung di jalan raya.

Tak hanya itu bekas tali pengikat baliho di tiang listrik dan di pohon juga sudah terlalu banyak bercampur dengan kabel-kabel listrik yang juga tidak tertata dengan baik.

Salah satu warga bernama Raffi (25) mengatakan baliho ini sudah bertahun-tahun dipajang dan meninggalkan bekas yang semrawut.

"Apalagi tali-talinya enggak pernah diberesin, dicopotin. Sudah lama. Padahal ini jalan nasional," ujarnya di lokasi, Jumat (23/6).

"Inginnya tidak lagi semrawut di jalan. Dertibkanlah. Jarang ditertibkan jadi ada terus. Bahaya kalau copot jatuh ke jalan. Bahaya," katanya.

Warga dan pengguna jalan berharap pihak terkait bisa menertibkan baliho yang semrawut di Jalan Transyogi ini. Sementara pihak Kecamatan Cileungsi, Bogor yang dimintai konfirmasi belum memberikan jawaban. ● **gio**

IDN:ANT



HARGA SAYUR MAYUR DI BANTEN NAIK

Pedagang sayur memilih cabai hijau di Pasar Induk Rau Kota Serang, Banten, Jumat (23/6). Menurut pedagang sejak dua hari terakhir harga sejumlah komoditas sayur mayur naik seperti harga cabai keriting dari Rp28 ribu menjadi Rp35 ribu perkilogram, harga bawang merah dari Rp40 ribu menjadi Rp45 ribu perkilogram, dan harga tomat dari Rp12 ribu menjadi Rp18 ribu perkilogram akibat meningkatnya permintaan sementara pasokan dari petani berkurang.